



## **PENGUMUMAN** LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

## Status Verifikasi Administratif Lengkap

**EKSEKUTIF BIDANG** 

**LEMBAGA** PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**UNIT KERJA** : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSUF HARIYANTO

: STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA Jabatan

**MANUSIA** 

3. NHK : 900510

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 225.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/121 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** 

42.500.000 Rp.

MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

13.000.000

MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR VARIO Tahun 2023, HASIL

SENDIRI Rp. 24.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	10.000.000
D.	SURAT BERHARGA	OK.	OK.	Rp.	of of
E.	KAS DAN SETARA KAS			Rp.	40.000.000
F.	HARTA LAINNYA	al.	al.	Rp.	al al
PIL	Sub Total	Ker	Ker	Rp.	317.500.000
III. HUTANG			Rp.	21.296.208	
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)			Rp.	296.203.792	

## Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik





- Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

